

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO
KEUANGAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)**

SKRIPSI



OLEH :

NAMA : LILIS ATMAWATI

NIM : 22. 2009. 016

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2013**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO
KEUANGAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

NAMA : LILIS ATMAWATI

NIM : 22. 2009. 016

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI**

2013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LILIS ATMAWATI

Nim : 22 2009 016

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh - sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang,.....2013



Penulis

LILIS ATMAWATI

PERSEMBAHAN DAN MOTO

**GUNAKANLAH WAKTUMU UNTUK MENUNTUT ILMU SETINGGI -
TINGGINYA KARENA WAKTU TAKKAN TERULANG KEMBALI**

(LILIS ATMAWATI)

Terucap Syukur Padamu Allah SWT,

Kupersembahkan Kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Suamiku Tercinta**
- 3. Kakak dan Adiku Tersayang**
- 4. Saudara-Saudaraku Tersayang**
- 5. Sahabat-Sahabatku**
- 6. Almamater**

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarohkatuh

Alhamdulillahirobil A'lamin, segala puji dan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, rahmat dan hidayahnya serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)” yang merupakan salah satu syarat dalam meraih Gelar Sarjana Strata 1 (satu) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tuak, suamiku dan saudara-saudaraku yang sangat aku cintai dan aku sayangi yang telah mendukung secara material maupun spiritual, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs.Sunardi, S.E,M.Si dan Ibu Welly, S.E,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran - saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak - pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak H. M. Idris, SE, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak M. Taufiq Syamsuddin, S.E.AK.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E.,AK.,M.Si dan ibu Welly, SE.M.Si selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mizan, SE. AK.M.Si selaku pembimbing Akademik Program Studi Akuntansi, serta bapak dan ibu Dosen beserta staf karyawan Fakultas Ekonomi Univeritas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Drs. Sunardi, S.E,M.Si dan Ibu Welly, S.E,M.Si selaku pembimbing Skripsi saya.
6. Ibu Rosalina Ghazali, S.E.,AK.,M.Si selaku Penelaah I saya dan Bapak Muhammad Fahmi, S.E.,M.Si selaku Penelaah II saya yang telah memberikan masukan dan saran dalam proses pembuatan skripsi ini.
7. Pimpinan, staf dan karyawan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komring Ilir yang telah memberi bantuan data maupun keterangan dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibuku tercinta (Judin dan PoniyeM) dan suamiku (Slamet Riyanto) serta Saudara - saudaraku (Purwanto, Dewi Lusi Inda Yanti, sugito, M. Adi Saputra, W. Angga Saputra, Lia Lestari, Siti Solekhah, Susi Kurniawati, Wahyuni) yang telah memberikan dukunganya.

semoga Allah SWT membalas semua amal dan ibadah yang telah dilakukan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarohkatu

Palembang,.....Agustus 2013

Penulis

LILIS ATMAWATI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
<i>ABSTRACT</i>.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori.....	17
1. Kinerja Keuangan	17
a. Pengertian Kinerja Keuangan	17

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan.....	17
c. Manfaat Pengukuran Kinerja	18
d. Kelebihan Kinerja Keuangan.....	19
e. Hubungan Rasio Keuangan dengan Kinerja	19
2. Anggaran.....	20
a. Pengertian Anggaran.....	20
b. Fungsi Anggaran Sektor Publik.....	22
c. Karakteristik Anggaran Sektor Publik.....	22
3. Unsur – unsur APBD	23
4. Rasio Keuangan	25
a. Pengertian Rasio Keuangan	25
b. Tujuan Rasio Keuangan	26
c. Jenis - jenis Rasio Keuangan	26
d. Analisis Rasio Keuangan	30
e. Keunggulan dan Keterbatasan Analisis Rasio	30
5. Pembiayaan	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Operasional Variabel.....	34
D. Data Yang Diperlukan	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Analisis dan Teknik Analisis	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan.....	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN.....	82
A. Simpulan	82
B. Saran.	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Selisih Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)	4
Tabel I. 2 Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)	6
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel III.1 Operasional Variabel	34
Tabel IV.1 Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)	63
Tabel IV. 2 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)	64
Tabel IV. 3 Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Tahun Anggaran 2008-2012.....	66
Tabel IV.4 Perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2008-2012.....	70
Tabel IV. 5 Perhitungan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2008-2012.....	73
Tabel IV. 6 Perhitungan Rasio Keserasian Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI Tahun Anggaran 2008-2012	76
Tabel IV.7 Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Tahun Anggaran 2008-2012.....	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II. 2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah	43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir (OKI)
- Lampiran 2: Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir (OKI)
- Lampiran 3: Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ilir (OKI)
- Lampiran 4: Surat Keterangan Selesai Riset dari Dinas Kabupaten Ogan
Komering Ilir (OKI)
- Lampiran 5: Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6: Sertifikat Lulus Membaca Al- Qur'an
- Lampiran 7: Sertifikat Test Toefl
- Lampiran 8: Lembar Pengesahan Perbaikan Skripsi
- Lampiran 9: Biodata Penulis

ABSTRAK

Lilis Atmawati/22 2009 016/2013/ Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)/ Akuntansi Sektor Publik.

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja keuangan APBD bila diukur dengan menggunakan rasio keuangan pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan rasio keuangan pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), metode analisis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) untuk rasio kemandirian sudah cukup memadai dimana tahun 2008 sebesar 3,86%, dan tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 4,50%, ini berarti menggambarkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bisa dinilai cukup mandiri, kemudian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami peningkatan. Untuk rasio efektifitas menunjukkan cukup baik karena telah memenuhi standar yang telah ditetapkan antara lain tahun 2008 sebesar 1,02%, tahun 2009 sebesar 1,03%, tahun 2010 sebesar 1,05%, tahun 2011 sebesar 1,22%, dan tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 0,96%. Untuk rasio efisiensi sudah cukup baik yaitu tahun 2008 sebesar 1,79%, tahun 2009 sebesar 1,06%, tahun 2010 sebesar 0,95%, tahun 2011 sebesar 0,31%, dan tahun 2012 sebesar 0,28%. Aktivitas Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin/aparatur daerah sehingga belanja pembangunan / pelayanan publik terhadap APBD masih terlalu kecil. Kontribusi sumber - sumber pendapatan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada tahun 2008/2009 berkisar 22,39%, tahun 2009/2010 mengalami penurunan menjadi 17,68%, kemudian pada tahun 2010/2011 naik menjadi 39,22%, dan tahun 2011/2012 mengalami penurunan menjadi 15,41%. Ini berarti penerimaan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) masih terpusat pada dana perimbangan, belum dapat untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah seperti pajak dan restribusi daerah. Untuk rasio pertumbuhan APBD Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang cukup baik dan menunjukkan yang positif, pertumbuhan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2010/2011 dimana pertumbuhan PAD sebesar 39,22%.

Kata Kunci: Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan.

ABSTRACT

Lilis Atmawati/22 2009 016/2013/The Analysis of Financial Performance Using Financial Ratio Towards The General Revenue and Ekspenditure Budget of Ogan Komering Ilir (OKI)/Publik Sector Accounting.

The problem of this study was how the financial performance of general revenue and expenditure budget using financial ratio at Ogan Komering Ilir (OKI) regional revenue department was. The objective of this study was to find out the financial performance of g. r. e. b using financial ratio at Ogan Komering Ilir (OKI) regional revenue department. Data analysis were qualitative and quantitative.

Based on the analysis, the independence ratio of Ogan Komering Ilir (OKI) regional revenue department was sufficient enough. It was indicated by the percentage ratio 3,86% in 2008, and 4,50% in 2009. It described that the financial independence of Ogan Komering Ilir (OKI) regency. Was sufficient enough in addition it always increased from 2010 to 2012. Then the effectiveness ratio was quite good because it had met the determined standard it was indicated by the percentage 1,02% in 2008, 1,03% in 2009, 1,05% in 2010, 1,22% in 2011 and 0,96% in 2012. The ratio in 2012 decreased 0,96% based on the analysis of efficiency ratio, it was also good enough it was indicated by the percentage ratio 1,76% in 2008, 1,06% in 2009, 0,95% in 2010, 0,31% in 2011, and 0,28% in 2012. The activities of Ogan Komering Ilir (OKI) regency, most of the budget owned by Ogan Komering Ilir (OKI) regency government had still focused on the routine expenditure/regional apparatus governmental but the budget for development of expenditure / public services was very minor. The contribution of Ogan Komering Ilir (OKI) revenue sources was sequentially 22,39% in 2008/2009, 17,68% in 2009/2010, 39,22% in 2010/2011, and 15,41% in 2011/2012. It means that Ogan Komering Ilir (OKI) governmental revenue still focused on the proportion fund, it had not been able to optimize the regional revenue, such as taxes, and regional retribution. Based on the growth ratio, general revenue and expenditure budget of Ogan Komering Ilir (OKI) increased from 2008 to 2012. showing positive growth. The highest growth was in 2010/2011 with regional revenue 39,22%.

Keywords: *independence ratio, effectiveness ratio and efficiency ratio, the ratio of harmony, growth ratio.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah dalam otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintah Keuangan Pusat dan Daerah disatu sisi merupakan peluang bagi daerah untuk mengetahui pemerintah dan mengelola pembangunan sendiri dengan kewenangan yang telah dilimpahkan. Namun disisi lain otonomi daerah merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerahnya, pemberian otonomi daerah ini terutama ditujukan untuk meningkatkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna meningkatkan sumber daya guna dan hasil dari segenap potensi yang dimiliki. Tantangan-tantangan tersebut harus dihadapi dengan kesiapan sumber daya manusia yang tangguh dan sumber daya keuangan yang memadai. (Kaho, 2008: 3)

Adanya undang-undang tersebut telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan

daerahnya. Sebenarnya pertimbangan mendasar terselenggaranya otonomi daerah adalah perkembangan dari dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (*desentralisasi*). Selain itu, keadaan luar negeri yang banyak menunjukkan bahwa semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap Negara, termasuk setiap Pemerintah Daerahnya. Hal tersebut akan tercapai dengan peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah melalui program otonomi daerah. Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Pemerintah daerah hendaknya lebih jeli melihat, mengali dan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya, terutama sekali sumber daya alam yang dapat menghasilkan dan meningkatkan penerimaan daerah. Kegiatan-kegiatan pembangunan daerah seyogyanya harus dibiayai sendiri dengan sumber penerimaan daerah atau dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak menggantungkan diri pada sumber-sumber lainnya. Dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) idealnya lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memperkecil keuntungan terhadap penerimaan yang bersal dari pemerintah pusat. Untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pembenahan struktural yang meliputi identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sistem dan

mekanisme pemungutan, peningkatan kapasitas infastruktur, kesemuanya ini adalah dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip rasa keadilan, kemampuan membayar dan efisiensi pemungutan.

Daya guna dan penyelenggaran pemerintah dalam memberikan layanan pada masyarakat, diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sangat penting dalam menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar menghasilkan tindakan dan hasil yang diinginkan (Mulyadi, 2001: 353).

Salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. (Nordiawan, dkk, 2007: 39).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk

evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) suatu instansi yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan dan pengeluaran asli daerah yang bersumber dari pajak, restribusi daerah serta pendapatan lainnya untuk pembangunan daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komerin Ilir (OKI) belum melaksanakan pembuatan anggaran yang digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan maupun sebagai alat untuk mengambil suatu keputusan, maka penyusunan Anggaran Dinas Pendapatan Daerah harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

- a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
- b. Disiplin Anggaran
- c. Keadilan Anggaran
- d. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dibawah ini dapat dilihat anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI):

Tabel I.1
Selisih Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja dan
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 2008-2012

Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012
Pendapatan Daerah Total Pendapatan Daerah	770.951.273.602,29	815.602.213.766,31	904.476.362.410,25	1.196.814.765.391,34	1.273.966.680.285,31
Belanja Daerah Total Belanja Daerah	801.762.231.640,00	805.824.858.731,00	878.612.514.372,00	1.196.988.070.626,00	1.303.983.396.858,00
Total Selisih	(31.170.958.038,29)	19.777.355.035,31	25.863.848.038,25	(173.305.235,34)	(30.016.716.573,31)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), 2012

Berdasarkan Tabel I.1, anggaran pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Tahun 2008 sebesar Rp. 770.951.273.602,29,- dan belanja daerah sebesar Rp. 801.762.231.640,- mengalami defisit. Tahun 2009 pendapatan mengalami peningkatan menjadi Rp. 815.602.213.766,31- dan belanja juga meningkat menjadi Rp. 805.824.858.731,- pada tahun ini mengalami surplus sebesar Rp. 19.777.355.035,31,- Begitu juga yang terjadi pada tahun 2010, dimana pendapatan dan belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 904.476.362.410,25,- dan Rp. 878.612.514.372,- tahun 2010 mengalami surplus sebesar Rp. 25.863.848.038,25,- pada tahun 2011 pendapatan daerah juga meningkat sebesar Rp. 1.196.814.765.391,34,- dan belanja daerah sebesar Rp. 1.196.988.070.626,- pada tahun ini mengalami defisit sebesar Rp. 173.305.235,34,- Tahun 2012 pendapatan daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.273.966.680.285,31,- dan belanja daerah pun mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.303.983.396.858.

Tabel I.2
Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)
Tahun 2008-2012

No	Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pendapatan Daerah PAD	27.325.153.355,29	33.444.471.314,31	34.035.650.199,25	47.387.305.538,43	54.629.346.473,49
	1.Pajak Daerah	4.552.965.635	5.097.861.940	7.271.596.519	13.209.683.829	13.590.399.104
	2.Restribusi Daerah	9.634.948.087	12.158.805.443	11.944.952.665	12.626.667.520	20.493.190.199
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.866.200.425,29	4.059.758.279,11	4.669.237.317,47	6.368.539.955,94	6.982.629.184,78
	4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.271.039.208,29	12.128.045.652,20	10.149.863.697,78	15.182.414.233,49	13.626.127.985,71
	Dana Perimbangan	707.549.066.460	742.383.605.221	832.965.818.526	977.191.646.403	1.050.762.693.363
	1. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	136.411.640.460	135.534.206.221	187.251.544.126	141.039.597.403	224.588.522.363
	2. Dana Alokasi Umum	510.395.426.000	533.734.399.000	541.732.260.000	669.904.298.000	743.452.601.000
	3.Dana Alokasi Khusus	60.742.000.000	73.115.000.000	67.107.400.000	66.414.400.000	82.721.570.000
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	36.077.053.787	39.774,.137.231	37.474.893.685	172.235.813.449,91	168.511.640.448,82
	Total Pendapatan Daerah	770.591.273.602,29	815.602.213.766,31	904.476.362.410,25	1.196.814.765.391,34	1.273.966.680.285,31

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI),2012

Tabel I.2
Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)
Tahun 2008-2012

No	Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012
2	Belanja Daerah	368.776.954.302	390.355.133.441	474.896.133.339	505.870.649.139	563.600.636.765
	1). Belanja Pegawai	268.872.115.387	314.242.763.626	395.033.425.145	442.073.212.359	500.747.853.835
	2). Subsidi	1.040.000.000	2.245.850.000	720.000.000.000	720.000.000	720.000.000
	3). Hibah	31.316.617.345	14.451.747.150	19.002.420.000	22.807.602.000	16.228.401.500
	4). Bantuan Sosial	22.381.416.171	11.788.558.277	13.791.527.013	12.420.544.276	18.654.668.456
	5). Belanja Bagi Hasil	34.456.621.399	34.051.710.388	32.468.579.054	14.808.590.004	14.261.593.174
	6). Bantuan Keuangan	11.627.684.000	13.404.004.000	13.880.182.126	13.040.700.000	12.778.400.000
	7). Belanja Tidak Terduga	82.500.000	170.500.000	000	000	209.719.800
	Belanja Langsung	431.985.277.338	415.496.725.290	403.716.381.034	691.117.421.487	740.382.760.093
	1). Belanja Pegawai	37.433.243.575	39.948.259.590	34.506.388.176	25.268.634.380	25.407.666.215
	2). Belanja Barang dan Jasa	160.017.745.343	182.780.715.670	176.926.260.922	298.923.502.435	333.681.088.681
	3). Modal	234.534.288.420	192.740.750.030	192.283.731.936	366.925.284.672	381.294.005.197
	Total Belanja	801.762.231.640	805.824.858.731	878.612.514.372	1.196.988.070.626	1.303.983.399.858
	Total Selisih	(31.170.958.038,29)	19.777.355.035,31	25.863.848.038,25	(173.305.235,34)	(30.016.716.573,31)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), 2012

Berdasarkan Tabel I.2 penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan *trend* yang terus meningkat dari tahun ketahun. Pada awal tahun yang diteliti tahun 2008, Anggaran Pendapatan Daerah Ogan Komering Ilir (OKI) sebesar Rp. 77.951.273.602,29,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan dana lain-lain, dana belanja daerah Rp. 801.762.231.640,- yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada tahun ini Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengalami defisit, karena besarnya belanja daerah yang salah satunya terdapat didalam belanja pegawai sebesar Rp. 37.433.243.575,- belanja barang dan jasa Rp. 160.017.745.343,- serta belanja modal sebesar Rp. 234.534.288.420. kemudian pada tahun 2009 anggaran mengalami peningkatan sebesar Rp. 815.602.213.766,31,- karena ada tambahan pos pendapatan daerah, untuk belanja daerah pun mengalami peningkatan sebesar Rp. 805.824.858.731,- di tahun 2009 ini Kabupaten Ogan Komering Olir (OKI) mengalami surplus, sebesar Rp. 19.777.355.035,31,- karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima lebih besar dari tingkat belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Tahun 2010 pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 904.476.362.410,- dan belanja daerah yang meningkat sebesar Rp. 878.612.514.372,- mengalami surplus sebesar Rp. 25.863.848.038,25. Tahun 2011 pendapatan daerah juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.196.814.765.391,34,- dan belanja daerah pun meningkat sebesar Rp.1.196.988.070.626,- tahun ini mengalami defisit sebesar Rp. 173.305.235,34,-.

Tahun 2012 anggaran pendapatan daerah meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 1.273.966.680.285,31,- dan belanja daerah pun mengalami peningkatan juga sebesar Rp. 1.303.983.396.858,- tahun ini juga mengalami defisit sebesar Rp. 30.016.716.573,31,-.

Dalam memasuki era otonomi daerah tahun 2008 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bisa dikatakan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, namun kenaikan tersebut tidak lantas menaikkan rasio. Walaupun penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat dibandingkan dengan APBD, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) selama 5 (lima) tahun terakhir jauh dari memuaskan. Hal ini berarti subsidi atau bantuan dari Pemerintah pusat masih sangat dominan dalam struktur APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Dalam menjalankan kegiatan menyusun anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan perhitungan rasio keuangan dalam rangka pengukuran kinerja. Tetapi dalam kenyataannya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) belum melaksanakan perhitungan rasio dalam rangka pengukuran kinerja keuangan. Berdasarkan tabel I.1 terlihat dari tahun 2008-2012 anggaran pendapatan dan belanja daerah terus meningkat dimana pada tahun 2008, 2011 dan 2012 mengalami defisit sedangkan di tahun 2009, 2010 mengalami surplus. Karena itu peneliti tertarik untuk mengukur kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan menggunakan rasio keuangan, dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Dengan

Menggunakan Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimanakah kinerja keuangan APBD bila diukur dengan menggunakan rasio keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui kinerja keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan rasio keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya perhitungan rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pada APBD.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan dan pertimbangan mengenai perhitungan rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan timbangan penelitian serupa dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang pertama dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah" oleh Jusmawati, (2011). Rumusan masalah adalah yang pertama bagaimana gambaran kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam delapan tahun terakhir (2003-2010), yang kedua bagaimana gambaran efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam delapan tahun terakhir (2003-2010) dan yang ketiga apakah kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pembangunan PAD. Adapun tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui gambaran kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam delapan tahun terakhir (2003-2010), yang kedua untuk mengetahui gambaran efisiensi PAD Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam delapan tahun terakhir (2003-2010), dan yang ketiga untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan PAD.

Penelitian sebelumnya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) dengan pihak yang kompeten dengan data yang diperlukan oleh penulis serta pengumpulan data yang dianggap relevan dengan masalah penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan data skunder. Variabel penelitian yang digunakan yaitu rasio kemandirian

keuangan daerah, rasio efektifitas pendapatan asli daerah, rasio pertumbuhan, dan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD dari tahun 2003-2010 terbukti dari nilai probabilitas $0,009 < 0,05$. secara parsial, rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD. Namun, rasio efektifitas dan rasio pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu persamaanya, sama-sama menghitung rasio keuangan. Perbedaanya yaitu penelitian sebelumnya menilai efisiensi pendapatan asli daerah dan penulis menilai kinerja keuangan dalam merealisasikan pendapatan pada dinas dan pertanggungjawabanya.

Penelitian yang kedua dengan judul "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2005-2009 (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar)" oleh Lutfia, (2011). Rumusan Masalah adalah bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Blitar dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2005-2009. Adapun tujuanya adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Blitar dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2005-2009.

Penelitian sebelumnya dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana dalam penelitian ini memanfaatkan presentase hanya merupakan langkah awal dari keseluruhan proses analisis yang kemudian dinyatakan dalam sebuah predikat yang menunjuk pada pernyataan keadaan dan ukuran kualitas. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Hasil analisis menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Blitar rata-rata kinerja yang baik ditunjukkan tahun 2005. Dan kinerja yang kurang baik rata-rata terjadi pada tahun 2007 hal itu ditinjau dari hasil perhitungan rasio-rasio keuangan pada APBD dan LRA yang digunakan.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian sebelumnya yaitu persamaanya, sama-sama menghitung rasio keuangan. Perbedaanya yaitu penelitian sebelumnya menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dari tahun 2005-2009 dan penulis menilai kinerja keuangan dalam merealisasikan pendapatan pada dinas dan pertanggungjawabanya.

Penelitian yang ke tiga dengan judul "Hubungan Antara Opini Audit Pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah" oleh Aviva, (2009). Rumusan masalah adalah apakah ada hubungan (korelasi) antara opini audit pada laporan keuangan daerah, pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) dengan kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan konsep *value vor money*. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan (korelasi) antara opini audit pada laporan keuangan

daerah, pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) dengan kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan konsep *value vor money*.

Penelitian sebelumnya menggunakan sampel kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan mengacu pada laporan keuangan daerah tahun 2007 yang telah dipublikasikan. Hasil analisis korelasi ganda menunjukkan bahwa hubungan antara opini audit, pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU), dengan kinerja keuangan daerah sangat kuat.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu persamaanya, sama-sama menggunakan kinerja keuangan daerah. Perbedaanya yaitu penelitian sebelumnya menilai hubungan antara opini audit pada laporan keuangan daerah, pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) dengan kinerja keuangan daerah dan penulis menilai kinerja keuangan dalam merealisasikan pendapatan pada dinas dan pertanggungjawabanya.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1	Jusmawati,2011	Rasio kemandirian Rasio efektifitas Rasio pertumbuhan Rasio efisiensi	Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD dari tahun 2003-2010 terbukti dari nilai probabilitas $0,009 < 0,05$. secara parsial, rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD. Namun, rasio efektifitas dan rasio pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD.
2	Lutfia Hidayatul Husna, 2011	Rasio Kemandirian Rasio Efektifitas Rasio Keserasian Rasio Pertumbuhan DSCR (<i>debt service coverage ratio</i>) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Rasio Efisiensi	Hasil analisis menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Blitar rata-rata kinerja yang baik ditunjukkan tahun 2005. Dan kinerja yang kurang baik rata-rata terjadi pada tahun 2007 hal itu ditinjau dari hasil perhitungan rasio-rasio keuangan pada APBD dan LRA yang digunakan.
3	Aviva Virgasari, 2009	Laporan keuangan daerah, pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) dengan kinerja <i>value for money</i> .	Hasil analisis korelasi ganda menunjukkan bahwa hubungan antara opini audit, pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU), dengan kinerja keuangan daerah sangat kuat.

Sumber: penulis, 2013

B. Landasan Teori

1. Pengertian Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Mulyadi (2001: 348) Kinerja Keuangan merupakan manifestasi keberhasilan atau kegagalan yang terjadi di kinerja operasional. Menurut Agnes Sawir (2003: 1) Kinerja Keuangan merupakan gambaran umum mengenai kondisi dan prestasi keuangan perusahaan yang terjadi pada masa lalu yang berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai aktivitas-aktivitas keuangan perusahaan yang telah terjadi.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan merupakan manifestasi keberhasilan dan kegagalan kinerja operasional sehingga menjadi prestasi keuangan pada masa lalu berdasarkan laporan keuangan perusahaan sehingga memperbaiki laba perusahaan.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Mardiasmo (2009: 122) secara umum, tujuan pengukuran kinerja adalah:

- (1). Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
- (2). Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
- (3). Untuk mengkomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.

(4). Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Menurut Mulyadi (2001: 353) tujuan pengukuran kinerja keuangan adalah untuk memotivasi karyawan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

Berdasarkan tujuan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan kinerja keuangan adalah untuk memotivasi karyawan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Manfaat Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009: 122) manfaat pengukuran kinerja yaitu:

- (1). Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- (2). Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- (3). Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- (4). Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- (5). Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- (6). Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.

- (7). Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- (8). Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

d. Kelebihan Dalam Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009: 122) kelebihan dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- (1). Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja.
- (2). Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- (3). Setiap alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- (4). Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman,
- (5). Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- (6). Memotivator dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan koreaktif untuk memperbaiki kinerja.

e. Hubungan Rasio Keuangan Dengan Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009: 126) Rasio keuangan APBD dapat menilai tingkat ketercapaian hasil kinerja sesuai dengan tujuan organisasi. Alat ukur ini digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja finansial dari pemerintah daerah atas pelaksanaan kerja yang terjadi. Analisis atas anggaran pendapatan dan

belanja daerah merupakan objek analisis yang digunakan sebagai sumber data dalam menentukan pengendalian kinerja finansial.

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dalam:

- 1). Nilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai otonomi daerah.
- 2). Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerahnya.
- 3). Mengukur sejauh mana aktifitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- 4). Mengukur sejauh mana pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di daerah selain membangun PAD, pemerintah daerah dapat membangun alternatif dana lain.
- 5). Melihat pertumbuhan / perkembangan perolehan dan pengeluaran yang dilakukan selama waktu tertentu.

2. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Menurut Mardiasmo (2009: 61) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam

organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dan hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat mengagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan managerial *plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:

- (1). Aspek perencanaan
- (2). Aspek pengendalian
- (3). Aspek akuntabilitas publik.

Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (*oversight body*) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran.

Menurut Mardiasmo (2009: 62) anggaran publik berisikan kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter dalam bentuk yang paling sederhana anggaran publik merupakan

suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

- (1). Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja)
- (2). Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk memadai rencana tersebut.

b. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009: 63) anggaran sektor publik berfungsi sebagai berikut :

- (1). Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
- (2). Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
- (3). Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan.
- (4). Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
- (5). Anggaran merupakan instrumen politik.
- (6). Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

c. Karakteristik Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009: 12) anggaran sektor publik mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (1). Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.

- (2). Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
- (3). Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- (4). Usulan anggaran telah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari anggaran.
- (5). Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah kondisi tertentu.

3. Unsur-Unsur APBD

Menurut Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara di era reformasi keuangan daerah mengisaratkan agar laporan keuangan semakin normatif. Untuk itu dalam bentuk yang baru APBD yang terdiri atas tiga. Adapun unsur-unsur anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan, meliputi:

- 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dimana PAD ini dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yang terdiri dari:
 - a). Pajak daerah
 - b). Retribusi daerah
 - c). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2). Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Adapun dana perimbangan terdiri dari :

- a). Dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.
- b). Dana alokasi umum
- c). Dana alokasi khusus

3). Lain-lain pendapatan daerah yang sah:

- a). Dana darurat
- b). Dana bagi hasil pajak dari provinsi
- c). Dana penyesuaian
- d). Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya.
- e). Lain-lain pendapatan yang sah

b. belanja, meliputi;

1). Belanja tidak langsung adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari:

- a). Belanja pegawai
- b). Subsidi
- c). Hibah
- d). Belanja bagi hasil
- e). Bantuan keuangan
- f). Belanja tidak terduga

2). Belanja langsung, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja langsung terdiri dari :

- a). belanja modal
- b). belanja barang dan jasa
- c). belanja tanah
- d). belanja asset tetap lainnya

3). Pembiayaan, meliputi:

- a). Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang terdapat pada rekening kas daerah.
- b). Pengeluaran pembiayaan / pengeluaran daerah adalah sumber pembiayaan yang ditujukan untuk mengalokasikan surplus anggaran.

4. Rasio Keuangan

a. Pengertian Rasio Keuangan

Menurut Sofyan (2008: 297) Rasio Keuangan adalah angka yang diperoleh dan hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Analisis rasio keuangan adalah cara menganalisis dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan data atas kuantitatif (Kuswandi, 2006: 2). Analisis rasio keuangan adalah analisis dengan jalan membandingkan satu persatu pos dengan pos laporan lainnya baik secara individu maupun bersama-sama guna mengetahui hubungan antara pos tertentu (Jumigan, 2005: 6).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan adalah analisis yang membandingkan pos laporan keuangan satu dengan laporan keuangan lainnya yang berguna untuk mengetahui penilaian posisi atau kondisi perusahaan saat ini. Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antar pos tertentu dengan pos lainnya. Penyederhanaan ini dapat dinilai dengan cepat hubungan antar pos tersebut dapat membandingkan dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian.

b. Tujuan Rasio Keuangan

Menurut Sofyan (2008: 297) tujuan rasio keuangan adalah menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Tujuan rasio keuangan adalah cara untuk mendeteksi kesehatan suatu perusahaan maupun pemerintah dan *problem-problem* yang sedang dihadapi (Kuswandi, 2006: 2).

Berdasarkan tujuan rasio keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dan prestasi untuk kemajuan dalam pemerintah maupun perusahaan.

c. Jenis-jenis Rasio Keuangan

Menurut Abdul Halim (2007: 231-241) penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, pengelolaan keuangan daerah transparan, jujur,

efektif-efisien dan akuntabel. Analisis rasio keuangan pada anggaran dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecederungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tertentu dengan daerah lainnya. Berikut beberapa rasio keuangan yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan masyarakat. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Penerimaan Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan dengan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. (Abdul Halim, 2007: 231)

2. Rasio Aktivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Dengan demikian semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Adapun rumusnya adalah :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio ini perlu dibandingkan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikatakan efisiensi apabila rasio yang dicapai <1 atau <100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin kecil. Adapun rumusnya adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasi seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui kegiatan tersebut efisien atau tidak. (Abdul Halim, 2007: 232)

3. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara

optimal. Adapun rumusnya adalah :

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Kemampuan suatu daerah dikatakan baik apabila total belanja pembangunan lebih besar dari total belanja rutin. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan infestasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*grow ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan

pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Rasio ini digunakan untuk melihat pertumbuhan positif atau negatifnya anggaran dari tahun ke tahun. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Penerimaan Tahun Lalu} - \text{penerimaan Tahun Sekarang}}{\text{Penerimaan Tahun Lalu}} \times 100\%$$

d. Analisis Rasio Keuangan pada APBD

Pengaruh analisis rasio publik khususnya terhadap APBD yang belum dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya, meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparansi, jujur, demokrasi, efektif, efisien dan akuntabel. Analisis rasio keuangan terhadap APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lainnya.

e. Keunggulan dan keterbatasan analisis rasio

Menurut Sofyan (2008: 298) menyatakan analisis rasio keuangan yang dimiliki keunggulan dibanding teknik analisis lainnya. Keunggulan tersebut adalah:

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.

4. Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron
5. Jika dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar yang dipakai tidak sama oleh karena itu jika dilakukan perbandingan bisa menimbulkan kesalahan.

5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah (LKPJ, 2010: 32) pembiayaan tersebut dibagi menjadi dua komponen terdiri dari:

- a). penerimaan pembiayaan, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).
- b). Pengeluaran pembiayaan, yang bersumber dari pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal dan sisa lebih perhitungan tahun berjalan.

Menurut Suherman (2009: 254) surplus adalah penerimaan pemerintah lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya. Sebaliknya defisit adalah pengeluaran pemerintah lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian jika ditinjau dari tingkat eksplanasinya Sogiyono (2011:

1) ada tiga macam yaitu :

1. Penelitian Deskriptif

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

Yaitu penelitian yang bersifat membandingkan, disini variabel masih sama dengan variabel mandiri tetapi sampelnya lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiasi atau Hubungan

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan dinas pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan menggunakan rasio keuangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang beralamat di Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 1 Muara Baru Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan.

C. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Rasio Kemandirian	Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumberpendapatan yang diperlukan masyarakat.	$\frac{\text{Rasio Kemandirian} = \text{PAD}}{\text{Bantuan pusat \& Pinjaman}} \times 100\%$	Rasio
2	Rasio Efektivitas	Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan yang dibandingkan dengan target yang ditetapkan dengan riil daerah	$\frac{\text{Rasio Efektivitas} = \text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$	Rasio
3	Rasio Efisiensi	Perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.	$\frac{\text{Rasio Efisiensi} = \text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$	Rasio
4	Rasio Keserasian	Kemampuan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal	$\frac{\text{Rasio belanja rutin APBD} = \text{Total belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Rasio belanja pembangunan APBD} = \text{Total belanja pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	Rasio

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin (dalam W. Gulo, 2002: 117) teknik pengumpulan data terdiri dari:

1. Pengamatan (Observasi)

Yaitu metode pengumpulan data dimana penelitian mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Survey

Yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk menerima tanggapan dari responden tentang sampel.

3) Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.

4. Kuisisioner

Yaitu pertanyaan yang disusun dalam kalimat tanya.

5. Dokumentasi

Yaitu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu dengan cara berkomunikasi langsung antara peneliti dengan pihak yang berwenang. Dokumentasi yaitu dengan cara menyalin atau fotocopy dokumen-dokumen yang ada diteori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga sesuai dengan tujuan penelitian ini.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut M. Iqbal (2003: 32) menyatakan bahwa metode analisis data terdiri dari :

1. Analisis kualitatif

Yaitu analisis yang dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat merupakan kewajiban dari suatu peristiwa yang sulit diukur

2. Analisis kuantitatif

Yaitu analisis yang dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat dihitung dengan rumus statistik.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis dan menilai semua data yang diperoleh melalui perhitungan empiris dari objek penelitian serta membandingkan dengan teori-teori dan ketentuan yang berlaku umum. Jadi analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis angka-angka dari perhitungan tersebut dengan menggunakan teori yang sesuai dengan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyajikan angka, tabel, dan uraian mengenai rasio keuangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor, 2 3 4 5 6 dan 7 Tahun 2008 yang memuat tentang pembentukan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terdiri dari 1 orang Sekretaris Daerah, 4 orang Asisten Bidang dan 11 Kepala Bagian. Selain itu juga terdapat 19 dinas dan 13 lembaga teknis daerah yang mencakup 1 Inspektorat, 9 Badan, 12 Kantor dan 1 RSUD. Seiring dengan peraturan tersebut diatas maka dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Dinas Pendapatan Daerah adalah suatu badan yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dan pajak lainnya untuk pembangunan daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) beralamat di Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 1 Muara Baru Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) wilayah kerja dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) meliputi delapan belas kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yaitu :

Kecamatan Kayu Agung, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kecamatan Jejawi, Kecamatan Pampangan, Kecamatan Pangkalan Lampan, Kecamatan Tulung Selapan, Kecamatan Air Sugihan, Kecamatan Pedamaran Timur, Kecamatan Lempuing Jaya, Kecamatan Lempuing, Kecamatan Mesuji, Kecamatan Mesuji Makmur, dan Kecamatan Raya.

2. Letak Geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terletak pada 104,20 dan 106,00 Bujur Timur dan 2,30 sampai 4,15 Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 10 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 19.023,47 km dengan kepadatan penduduk sekitar 35 jiwa per km. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terdiri atas 18 Kecamatan. Wilayah paling luas Kecamatan Tulung Selapan (4.853,40 km) dan yang paling sempit adalah Kecamatan Kayu Agung (145,45 km) batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyu Asin, Ogan Ilir dan Kota Palembang, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, sebelah Barat dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ulu Timur, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Selat Bangka.

3. Wilayah Administrasi

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terbagi habis dalam 18 Kecamatan dan masing-masing Kecamatan terbagi atas desa-desa dan kelurahan. Sedangkan setiap desa dan kelurahan didalamnya tersusun atas dusun, lingkungan maupun rukun warga dan sebagian masih dibagi kedalam rukun tetangga.

Pada tahun 2006 Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang sebelumnya terdiri dari 12 Kecamatan dimekarkan menjadi 18 Kecamatan. Kecamatan Mesuji Makmur, Mesuji Raya, dan Mesuji. Kecamatan Lempuing dimekarkan menjadi Kecamatan Lempuing Jaya dan Lempuing. Kecamatan Tanjung Lubuk dimekarkan menjadi Kecamatan Teluk Gelam dan Tanjung Lubuk. Kecamatan Pampangan dimekarkan menjadi Kecamatan Pampangan dan Pangkalan Lampam, Kecamatan Tulung Selapan dimekarkan menjadi Kecamatan Tulung Selapan, Cegal, Sungai Menang dan Air Sugihan. Jumlah desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada tahun 2008 sebanyak 310 desa atau kelurahan, terdiri atas 13 kelurahan dan 297 desa.

4. Struktur Organisasi

a. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

sebelum membahas lebih lanjut susunan organisasi serta uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unit yang ada, sebaiknya diketahui dahulu mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

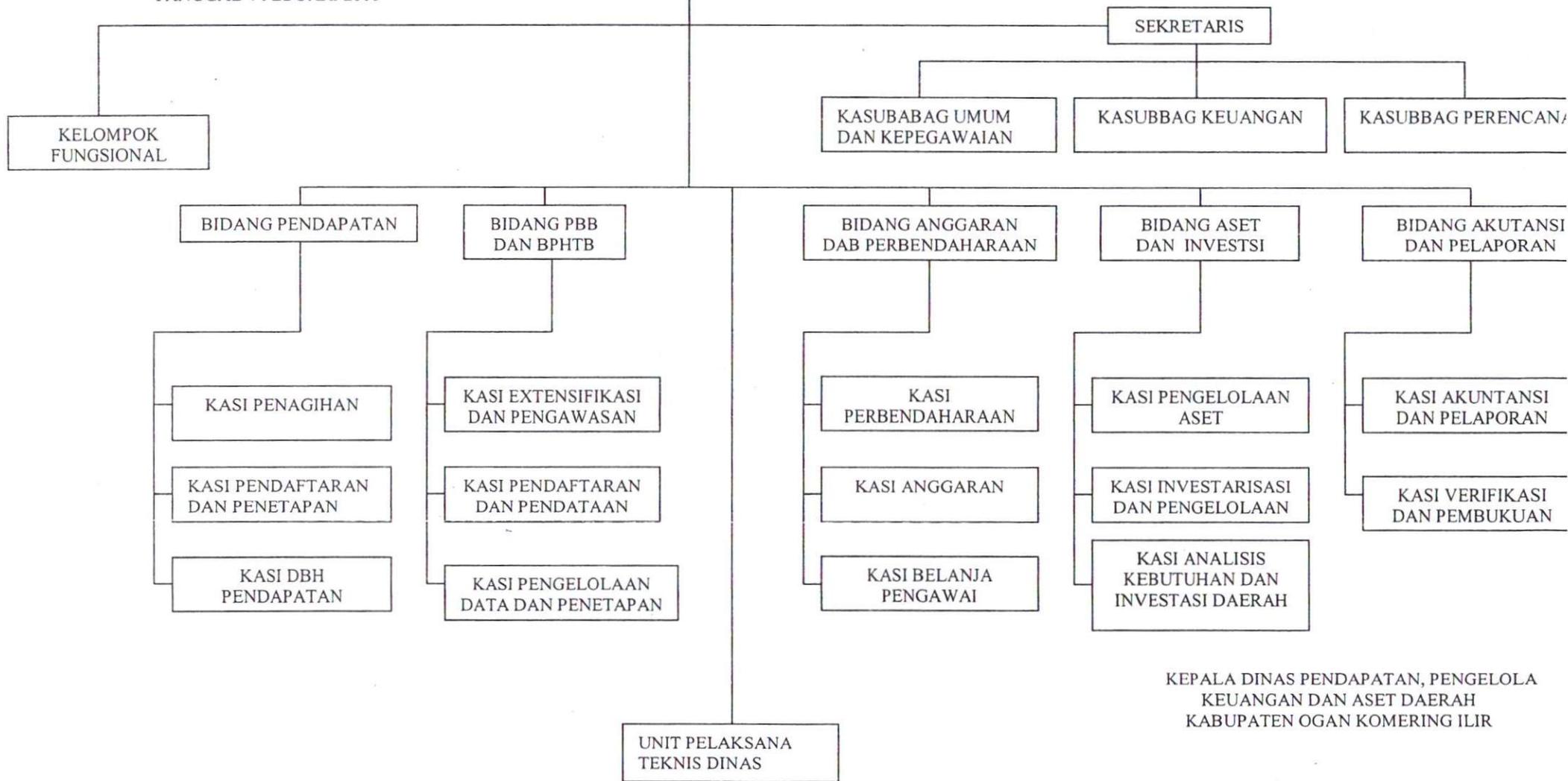
Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah dan wujud pelaksanaan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dibidang pendapatan, dimana Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) ini dipimpin oleh Kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pendapatan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), maka perlu disusun penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Susunan organisasi ini diharapkan dapat batasan yang jelas mengenai tugas dan wewenang dari masing-masing unit. Adapun susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi
 - a. Kasub bagian Perencanaan
 - b. Kasub bagian Keuangan
 - c. Kasub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahi :
 - a. Kasi Penagihan
 - b. Kasi Pendapatan dan Penetapan
 - c. kasi DBH Pendapatan
4. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi :
 - a. Kasi Ekstensifikasi dan pengawasan
 - b. Kasi Pendaftaran dan Pendataan
 - c. Kasi Pengelolaan dan Penetapan

5. Bidang Anggaran DAB Perbendaharaan, membawahi :
 - a. Kasi Perbendaharaan
 - b. Kasi Anggaran
 - c. Kasi Belanja Pegawai
6. Bidang Aset dan Investasi, membawahi :
 - a. Kasi Pengelolaan Aset
 - b. Kasi Investasi dan Pengelolaan
 - c. Kasi Analisis kebutuhan dan investasi daerah
7. Bidang Akuntansi dan pelaporan, membawahi :
 - a. Kasi Akuntansi dan pelaporan
 - b. Kasi Verifikasi dan pembukuan
8. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
9. Kelompok Jabatan Fungsional



KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

c. Tugas dan Fungsi

Setelah melihat susunan organisasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) secara umum, maka selanjutnya dikemukakan secara garis besar tugas dan fungsi dari masing-masing yang ada.

Adapun uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unit yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- a. pengelolaan urusan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian
- b. penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan dibidang Pendapatan Daerah
- c. penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah APBD dan APBD perubahan
- d. penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis pengelolaan, pengumpulan dalam penyusunan rencana pengadaan, pemeliharaan, dan mengamankan Aset Daerah
- e. perencanaan yang meliputi segala usahadan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan program bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- f. pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan

yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

- g. penelitian dan pengembangan yang meliputi segala kegiatan usaha untuk menyelenggarakan, menggali, meneliti, dan mengembangkan serta menumbuhkan hubungan untuk melaksanakan dan meningkatkan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Sekretariat

- a. memimpin bagian sekretariat dalam pelaksanaan kegiatan teknis administrasi umum, perlengkapan dan peralatan, penataan arsip, kepegawaian dan penatausahaan keuangan SKPD (DPPKAD)
- b. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan anggaran RKA SKPD
- c. mengkoordinir penyusunan DPA SKPD
- d. mengkoordinir penyusunan kebutuhan anggaran kas SKPD
- e. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas
- f. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing-masing agar memahami tugasnya
- g. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar

- h. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi
- i. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir
- j. mengatur pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai permasalahanya agar penyampaianya ketempat tujuan tepat waktu
- k. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan sesuai kebutuhan unit kerja agar kegiatan pokok dapat terlaksana dengan lancar
- l. mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan hukum sesuai dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
- m. mengkoordinir penyusunan program kerja, dinas SKPD berdasarkan masukan dari satuan kerja agar tercapai sasaran yang telah ditentukan
- n. mengkoordinir pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh satuan unit kerja sesuai permasalahanya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
- o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan melalui pemantauan dan monitoring sesuai program yang telah ditetapkan untuk mengetahui hambatan dan kendala yang terjadi
- p. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

(1) Kepala Sub Bagian Umum

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan perpustakaan
- c. menginventarisir pengadaan, mengelola, dan memelihara serta pengamanan alat-alat perlengkapan dan perpustakaan
- d. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait baik internal maupun eksternal (Badan Kepegawaian Daerah)
- e. mengatur pendistribusian surat masuk dan keluar sesuai permasalahannya agar menyampaikan ketujuan tepat waktu
- f. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan dan perjalanan dinas sesuai kebutuhan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar
- g. mengkoordinir kegiatan pelayanan kerumah tanggaan dan keprotokolan sesuai rencana kebutuhan masing-masing unit untuk mendukung pelaksanaan tugas
- h. mengumpulkan dan mengelola data yang berhubungan dengan bidang kepegawaian
- i. menyiapkan dan mengelola data yang berhubungan dengan bidang kepegawaian
- j. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
- k. menyiapkan data dan bahan perlengkapan untuk pengusulan dan pengangkatan dalam jabatan

- l. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan
- m. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan membangun karir
- n. memberi saran dan pendapat kepada atasan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan

- a. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja rutin dan kegiatan kantor
- b. mengatur, pelaksanaan dan penggunaan anggaran
- c. meneliti kelengkapan SPP yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK
- d. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
- e. melakukan verifikasi SPP
- f. menyiapkan SPM
- g. melakukan verifikasi harian atas penerimaan SKPD
- h. melaksanakan akuntansi SKPD dan menyiapkan laporan keuangan SKPD
- i. mengusulkan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan dan pembuat daftar gaji
- j. menyiapkan dan melaksanakan biaya kontribusi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

- k. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya.
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

(3). Kepada Sub Bagian Perencanaan

- (a). Menyusun program kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah baik program jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (b). Menyiapkan rencana anggaran beserta perubahannya sesuai dengan kebutuhan
- (c). Mengusulkan pimpinan kegiatan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
- (d). Bersama Sub Bagian Keuangan menyiapkan data dan laporan realisasi anggaran sesuai rencana dan program kerja secara berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang menangani perencanaan dan keuangan
- (e). Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya
- (f). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya

3. Bidang Pendapatan Asli Daerah

- a. Melakukan pendaftaran / pendataan, penetapan, dan penagihan yang berhubungan dengan pajak dan restribusi daerah
- b. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan pengelolaan pendapatan daerah dari PAD , Dana perimbangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,

yang mencakup bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dan pendapatan lain-lain

- c. Membuat prakiraan / asumsi rencana penerimaan pendapatan daerah dan mengevaluasi penerimaan pendapatan daerah
- d. Menyusun rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- e. Meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah
- f. Melakukan penyuluhan pajak dan retribusi daerah, dan pajak-pajak lainnya
- g. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah

(1). Kasi Penagihan

- (a). Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan
- (b). Melaksanakan kegiatan penagihan ke Wajib Pajak Daerah dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (c). Membuat laporan dan merekapitulasi hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah
- (d). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh atasan

(2). Kasi Pendaftaran dan Penetapan

- (a). Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah
- (b). Melakukan proses penetapan pajak dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan dan sistem serta prosedur yang berlaku

- (c). Melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap subjek dan objek pajak daerah
 - (d). Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Restribusi Daerah (NPWRD)
 - (e). Menerbitkan kartu data wajib pajak / restribusi daerah
 - (f). Melaksanakan penetapan secara jabatan pajak dan restribusi daerah
 - (g). Melaporkan hasil ketetapan pajak daerah dan restribusi daerah
 - (h). Menyelenggarakan pengawasan terhadap penyediaan dan penggunaan benda berharga yang berkaitan dengan pajak dan restribusi daerah
 - (i). Menerima dan melayani surat keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan data dan mengelola data sumber penerimaan daerah lainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - (j). Melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan atasan
- (3). Kasi DBH pendapatan
- (a). Melakukan pemantauan penerimaan pendapatan daerah berupa pajak, restribusi dan pendapatan lainnya
 - (b). Menyelenggarakan kegiatan penghimpunan data dan informasi dana bagi hasil serta dana perimbangan
 - (c). Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan perimbangan keuangan
 - (d). Menyusun rencana pendapatan dari dana perimbangan
 - (e). Pengelolaan proses penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang menjadi hak daerah

- (f). Melaksanakan kegiatan pengelolaan perimbangan keuangan yang bersumber dari pendapatan lain-lain diluar pajak dan bukan pajak
- (g). Melakukan penetausahaan penerimaan pendapatan daerah dan sumber-sumber pendapatan yang sah
- (h). Melakukan koordinasi ke dinas-dinas / instansi-instansi tentang penerimaan pendapatan daerah
- (i). Melakukan rekonsiliasi realisasi dana perimbangan dengan satuan kerja terkait
- (j). Mengevaluasi penerimaan dana bagi hasil dan dana perimbangan disetiap SKPD penerima
- (k). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

4. Bidang PBB dan BPHTB

- a. melakukan pendataan dan pengukuran objek pajak bumi dan bangunan
 - b. membuat prakiraan / asumsi rencana penerimaan PBB dan BPHTB
 - c. melakukan penetapan pajak bumi dan bangunan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB
- (1). Kasi ekstensifikasi dan pengawasan
- (a). Menerima laporan keberatan, pengurangan, dan penghapusan dari wajib pajak terhadap objek pajak bumi dan bangunan
 - (b). Meneliti dan memproses laporan wajib pajak bumi dan bangunan terhadap keberatan, pengurangan maupun penghapusan wajib pajak dan atau objek PBB

- (c). Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian data wajib pajak bumi dan bangunan
- (d). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PBB dan BPHTB
- (e). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

(2). Pendaftaran dan Pendataan

- (a). Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib Pajak Bumi dan Bangunan
- (b). Melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap subjek dan objek PBB
- (c). Melaksanakan dan menerima proses penyelenggaraan BPHTB
- (d). Menerima laporan keberatan, pengurangan, dan penghapusan dari wajib pajak terhadap objek pajak bumi dan bangunan
- (e). Meneliti dan memproses laporan wajib pajak bumi dan bangunan terhadap keberatan, pengurangan maupun penghapusan wajib pajak atau objek PBB
- (f). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

(3). Kasi pengelolaan dan penetapan

- (a). Melaksanakan pengolahan data PBB dan BPHTB
- (b).menetapkan nilai jual objek pajak (NJOP) dan mengevaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali kecuali objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah
- (c). Menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) PBB kepadawajib pajak
- (d). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

5. Bidang Anggaran DAB perbendaharaan

- a. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja di sub bidang anggaran sub bidang perbendaharaan dan sub bidang belanja pegawai
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penganggaran perbendaharaan dan belanja pegawai
- c. menyusun rencana operasional kerja bidang anggaran berdasarkan program dan sasaran dari masing-masing unit pengelola yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan perubahan APBD
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan APBD serta pengesahannya
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan APBD
- g. menyiapkan rencana dan rancangan peraturan daerah pembentukan dana cadangan, pinjaman daerah/utang, penyertaan modal/investasi dan pemberian pinjaman daerah
- h. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan
- i. membuat penyusunan perkiraan belanja keuangan daerah

(1). Kasi Perbendaharaan

- (a). Menyiapkan SPD (Surat Pencairan Dana), menyiapkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

- (b). Meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), menetapkan penertiban dan surat penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan menyusun serta mengelola DPA-PPKD
 - (c). Menguji kebenaran SPM dari setiap SKPD
 - (d). Menerima, menyimpan, dan membayar uang daerah sebagai fungsi kas daerah
 - (e). Menyiapkan anggaran kas, menyusun laporan arus kas serta memantau pelaksanaan APBD
 - (f). Menunjuk bank operasional untuk melakukan penerimaan dan pembayaran kas sebagai salah satu fungsi kas daerah
 - (g). Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk
 - (h). Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
 - (i). Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atau beban rekening kas umum daerah
 - (j). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh atasan
- (2). Kasi Anggaran
- (a). Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penganggaran
 - (b). Menyusun rencana kegiatan dan program kerja sub bidang anggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku

- (c). Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dala penyusunan APBD
 - (d). Menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana perubahan APBD
 - (e). Mengolah data serta informasi yang berkaitan dengan bidang anggaran
 - (f). Memberikan petunjuk teknis perencanaan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
 - (g). Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
 - (h). Menerima dan mengolah rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD
 - (i). Menerima dan mengolah dokumen pelaksana anggaran (DPA) / dokumen pelaksana perubahan anggaran (DPPA) dan dokumen pelaksana anggaran lanjutan (DPAL) SKPD dilingkungan pemerintah daerah
 - (j). Menganalisa rencana anggaran belanja daerah
 - (k). Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun laporan berkala tentang perkembangan penyusunan APBD
- (3). Kasi Belanja Pegawai
- (a). Membantu atasan dalam bidang tugasnya
 - (b). Memeriksa kebenaran dan kelengkapan SPM belanja pegawai pada belanja langsung SKPD dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - (c). Menerbitkan SP2D belanja pegawai pada belanja tidak langsung SKPD dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir

- (d). Menerbitkan surat keterangan penghentian pembayaran PNS pensiun atau mutasi keluar Kabupaten Ogan Komering Ilir
- (e). Memeriksa kebenaran SK perubahan (SK pangkat, SK berkala, tunjangan jabatan, dan tunjangan keluarga) serta mengedit data gaji
- (f). Membuat daftar gaji PNS / CPNS dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir
- (g). Menyusun anggaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung SKPD dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir
- (h). Membuat SSBP (surat setoran bukan pajak) belanja pegawai pada belanja tidak langsung
- (i). Melakukan tugas lain yang diberikan atasan

6. Bidang Aset dan Investasi

- a. menyusun program kerja bidang aset dan investasi
- b. mengkaji dan menilai barang milik daerah
- c. menyimpan dokumen dan memelihara barang milik daerah
- d. mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah
- e. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah
- f. menyiapkan bahan untuk koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan investasi dalam dan luar negeri
- g. melaksanakan pembinaan administrasi badan usaha milik daerah (BUMD) yang terdiri dari perusahaan daerah, Bank pembangunan daerah, dan badan usaha kredit pedesaan (BUKP)
- h. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program bidang aset dan investasi

(1). Kasi Pengolahan Aset

- (a). memproses dan mengusulkan penunjukkan pengurus / penyimpan barang pada setiap SKPD
- (b). Menganalisa dan melakukan proses administrasi usulan penggunaan barang milik daerah
- (c). Menganalisa dan melakukan proses administrasi dan penghapusan aset daerah
- (d). Menganalisa dan melakukan proses perubahan status hukum barang milik daerah
- (e). Menyusun rencana pemanfaatan barang-barang milik daerah
- (f). Menganalisa dan melakukan proses pemanfaatan barang milik daerah
- (g). Melakukan monitoring proses pengelolaan aset daerah
- (h). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya

(2). Kasi investasi dan pengelolaan

- (a). Mendata, mencatat dan menyusun laporan inventarisasi daerah
- (b). Melakukan penatausahaan barang milik daerah
- (c). Menyiapkan laporan yang berkenaan dengan penatausahaan dan penilaian barang milik daerah
- (d). melakukan administrasi penyimpanan barang pada setiap SKPD
- (e). Melakukan pengamanan, pemeliharaan dan melengkapi dokumen / bukti sah kepemilikan barang milik daerah
- (f). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya

(3). Kasi analisis kebutuhan dan investasi daerah

- (a). Menyusun standarisasi barang, standarisasi harga barang dan standarisasi kebutuhan barang daerah
- (b). Menghimpun dan menganalisis usulan dan rencana kebutuhan barang SKPD dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang SKPD
- (c). Menyusun rencana daftar kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah
- (d). Menyusun rencana pengembangan investasi daerah
- (e). Melakukan proses dalam rangka pelaksanaan investasi daerah
- (f). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya

7. bidang akuntansi dan pelaporan

- a. mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja bidang akuntansi
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah maupun akuntansi SKPD
- d. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
- e. melakukan verifikasi atas SP2D yang telah terbit apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f. melaksanakan pembukuan sampai dengan pelaporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

- g. menghimpun dan mengolah data pengelolaan keuangan daerah
- h. penyusunan laporan keuangan daerah
- i. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah

(1). Kasi akuntansi dan pelaporan

- (a). Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan akuntansi pemerintah daerah
- (b). Menyiapkan rancangan perda tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah
- (c). Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah maupun akuntansi SKPD
- (d). Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah
- (e). Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya
- (f). Melakukan serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas
- (g). Melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPKD dengan laporan keuangan SKPD
- (h). Memeriksa dan menghimpun laporan realisasi anggaran setiap satuan kerja
- (i). Melaksanakan laporan penyusunan arus kas secara periodik kepada kepala daerah

- (j). Membuat laporan keuangan setiap semester (penyusunan laporan semester)
 - (k).Menyiapkan laporan keuangan tahunan berkaitan dengan pertanggungjawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan APBD
 - (l). Menyiapkan rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - (m).Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan
- (2). Kasi verifikasi dan pembukuan
- (a). Melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara peneluaran
 - (b). Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan
 - (c). Melaksanakan penatausahaan pembukuan akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, aset dan selain kas pada SKPD berdasarkan transaksi dan bukti yang sah
 - (d). Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya
 - (e). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam rangka menyelenggarakan rumah tangga daerah yang berprinsip kearah terwujudnya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab sejalan dengan pesatnya pelaksanaan pembangunan di Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tentu memerlukan dana yang tidak sedikit dimana selanjutnya perkembangan tugas pajak dan restribusi ini menimbulkan suatu

pemikiran pemerintah untuk menggali, mengelola dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Secara garis besar yang dibahas dalam bab ini yaitu Kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan dalam merealisasikan pendapatan daerah. Analisis Rasio keuangan terdiri dari empat bagian yaitu analisis rasio kemandirian keuangan daerah, analisis rasio efektivitas dan efisiensi, analisis rasio keserasian, dan analisis rasio pertumbuhan. Berikut ini akan disajikan beberapa tabel dan perhitungannya sebagai berikut:

1). Analisis Rasio Kemandirian

suatu daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang diperlukan daerah. Rasio ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana eksteren dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman dari luar. Adapun rumusnya adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk tahun 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1
Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)
Tahun 2008-2012

No	Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pendapatan asli daerah	27.325.153.355,29	33.444.471.314,31	34.035.650.199,25	47.387.305.538,43	54.629.346.473,49
	Dana Perimbangan	707.549.066.460	742.383.605.221	832.965.818.526	977.191.646.403	1.050.762.693.363
	Lain-lain	36.077.053.787	39.774.137.231			168.511.640.448,82
	Pendapatan sah yang lain			37.474.893.687	172.235.813.449,91	
	Total Pendapatan Daerah	770.591.273.602,29	815.602.213.766,31	904.476.362.410,25	1.196.814.765.391,34	1.273.966.680.285,31
2	Belanja Daerah					
	- Belanja Tidak Langsung	369.776.954.302	390.355.133.441	474.896.133.339	505.870.649.130	563.600.636.765
	- Belanja Langsung	431.985.277.338	415.469.725.290	403.716.381.034	691.117.421.487	740.382.760.093
	Total Belanja	801.726.231.640	805.824.858.731	878.612.514.372	1.196.988.070.626	1.303.983.396.858

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 2012

Tabel IV.2
Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Bagi Hasil Pajak dan Bantuan dari
Pemerintah Pusat
Tahun 2008-2012

No	Jenis Penerimaan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pajak Daerah	4.552.965.635	5.097.861.940	7.271.596.519	13.209.683.829	13.590.346.473,49
2	Restribusi Daerah	9.634.948.087	12.158.805.443	11.944.952.665	12.626.667.520	20.493.190.199
3	Laba BUMD	2.866.200.425,29	4.059.758.279,11	4.669.237.317,47	6.368.539.955,94	6.982.629.184,78
4	Lain PAD yang sah	10.271.039.208	12.128.045.652	10.149.863.697,78	15.182.414.233,49	13.626.127.985,71
	Total PAD	27.325.153.355,29	33.444.471.314,31	34.035.650.199,25	47.387.305.538,43	54.692.346.473,49
	Bagi Hasil & Bantuan Provinsi	707.549.066.460	742.383.605.221	187.251.544.126	977.191.646.403	1.050.762.693.363

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 2012

Tahun 2008

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{27.325.153.355,29}{707.549.066.460} \times 100\% \\ &= 386\% \end{aligned}$$

Tahun 2009

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{33.444.471.314,31}{742.383.605.221} \times 100\% \\ &= 450\% \end{aligned}$$

Tahun 2010

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{34.035.650.199,25}{832.965.818.526} \times 100\% \\ &= 408\% \end{aligned}$$

Tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{47.387.305.538,43}{977.191.646.404} \times 100\% \\ &= 484\% \end{aligned}$$

Tahun 2012

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{54.629.346.473,49}{1.050.762.693.363} \times 100\% \\ &= 519\% \end{aligned}$$

Tabel IV. 3
Perhitungan Rasio Kemandirian
Tahun Anggaran 2008 - 2012

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman	Rasio Kemandirian
2008	27.325.153.355,29	707.549.066.460	386 %
2009	33.444.471.314,31	742.383.605.221	450 %
2010	34.035.650.199,25	832.965.818.526	408 %
2011	47.387.305.538,43	977.191.646.404	484 %
2012	54.629.346.473,49	1.050.762.693.363	519 %

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2013

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa rasio kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) adalah :

- a. Tahun 2008 sebesar 386% dan Tahun 2009 sebesar 450% mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengalami peningkatan dibandingkan dengan peningkatan realisasi. Penerimaan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman. Dimana realisasi penerimaan PAD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada tahun 2008 dan 2009, sektor pajak daerah pada tahun 2008 sebesar Rp. 4.552.965.635,- tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.097.861.940,-. Sektor restribusi daerah tahun 2008 sebesar Rp. 9.634.948.087,- tahun 2009 Rp. 12.158.805.443,- ini berarti tahun 2008 sampai 2009 kemandirian keuangan menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Untuk tahun 2010 rasio kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebesar 408 % dan tahun 2011 mengalami

peningkatan sebesar 484 % hal ini dikarenakan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2010 sebesar Rp. 34.035.650.199,25,- dimana sektor pajak daerah Rp.7.271.596.519,- dan tahun 2011 total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 47.387.305.538,43,- dan sektor pajak Rp. 13.209.683.826,- dan sektor restribusi pada tahun 2010 sebesar Rp. 11.944.952.665,- dan tahun 2011 sebesar Rp. 12.626.667.520,-. Ini berarti tahun 2010 sampai 2011 menggambarkan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) semakin mandiri dan tingkat ketergantungannya semakin kecil terhadap pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin kecil.

- b. Pendapatan Asli Daerah dan juga untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi). Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengambil kebijakan-kebijakan pada sektor pajak daerah dan restribusi daerah. Sektor pajak daerah dengan menambahkan pajak parkir daerah kedalam kegiatan pajak parkir. Pendapatan Asli Daerah sehingga jenis pajak daerah menjadi 7 (tujuh) jenis pajak dan sektor restribusi menjadi 42 restribusi daerah, sehingga dengan kebijakan tersebut ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pusat dan provinsi) dapat lebih kecil.
- c. Untuk meningkatkan pembagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan yaitu dengan mendorong meningkatkan investasi, industri, perdagangan dan jasa serta pengembangan pariwisata dan meningkatkan

kelestarian warisan budaya dan meningkatkan kerja sama antar daerah dan pihak-pihak lain baik dari dalam maupun dari luar.

2). Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

- a. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

- b. Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah pada anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2008 2009 2010 2011 dan 2012 adalah sebagai berikut :

1). Rasio Efektivitas

Tahun 2008

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{27.325.153.355,29}{26.716.776.609} \times 100\% \\ &= 102\% \end{aligned}$$

Tahun 2009

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{33.444.471.314,31}{32.502.223.063} \times 100\% \\ &= 103\% \end{aligned}$$

Tahun 2010

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{34.035.650.199,25}{32.416.991.173} \times 100\% \\ &= 105\% \end{aligned}$$

Tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{47.387.305.538,43}{38.970.922.353} \times 100\% \\ &= 122\% \end{aligned}$$

Tahun 2012

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{54.692.345.473,49}{57.187.743.118} \times 100\% \\ &= 96\% \end{aligned}$$

Tabel IV. 4
Perhitungan Rasio Efektivitas
Tahun Anggaran 2008 - 2012

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan Daerah	Rasio Efektivitas
2008	27.325.153.355,29	26.716.776.609	102 %
2009	33.444.471.314,31	32.502.223.063	103 %
2010	34.035.650.199,25	32.416.991.173	105 %
2011	47.387.305.538,43	38.970.922.353	122 %
2012	54.692.345.473,49	57.187.743.118	96 %

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2013

Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel IV.4 dapat digambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (efektivitas).

Dari hasil perhitungan rasio efektifitas Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yaitu tepatnya diawali pada tahun 2008/2009 rasio efektifitas adalah sebesar 102 % dan pada tahun 2009 menjadi 103 % kemudian pada tahun 2010 dan 2011 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 menjadi 105 % dan pada tahun 2011 menjadi 1,2 %, dan pada tahun 2012 mengalami penurunan drastis hingga melewati ambang batas angka 1 (satu), yaitu turun menjadi 96 %.

Pada dasarnya didalam analisis rasio efektifitas diketahui bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau maksimal 100 (seratus) persen. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Sesuai hasil perhitungan rasio diatas dapat digambarkan kemampuan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) didalam menjalankan tugasnya sudah stabil karena mengalami kenaikan rasio efektifitas diatas angka 1

(satu) persen. Maknanya, kinerja pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sudah efektif karena rasio efektifitasnya sebagian besar mencapai angka 1 (satu) atau 100 (seratus) persen. Kecuali untuk tahu 2012 dimana rasionya dibawah angka 1 (satu) yaitu 96 %.

Kestabilan rasio efektifitas ini disebabkan karena pemerintah daerah sudah terampil didalam mengontrol rencana dan realisasi terhadap pajak daerah dan restribusi daerah pada APBD. Realisasi pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari pajak daerah dan restribusi daerah lebih besar dari yang telah direncanakan.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah perlu disandingkan dengan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 (seratus) persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 adalah sebagai berikut :

2). Rasio Efisiensi

Tahun 2008

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{48.909.483.054}{27.325.153.355,29} \times 100\% \\ &= 179\% \end{aligned}$$

Tahun 2009

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{35.552.399.054}{33.444.471.314,31} \times 100\% \\ &= 106\% \end{aligned}$$

Tahun 2010

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{32.468.579.054}{34.035.650.199,25} \times 100\% \\ &= 95\% \end{aligned}$$

Tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{14.808.590.004}{47.387.305.538,43} \times 100\% \\ &= 31\% \end{aligned}$$

Tahun 2012

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{15.329.608.104}{54.692.346.473,49} \times 100\% \\ &= 28\% \end{aligned}$$

Tabel IV. 5
Perhitungan Rasio Efisiensi
Tahun Anggaran 2008 - 2012

Tahun	Biaya yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi
2008	48.909.483.054	27.325.153.355,29	179%
2009	35.552.399.054	33.444.471.314,31	106%
2010	32.468.579.054	34.035.650.199,25	95%
2011	14.808.590.004	47.387.305.538,43	31%
2012	15.329.608.104	54.692346.473,49	28%

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2013

Dari tabel IV.5 diketahui hasil perhitungan rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata-rata rasio efisiensi berada dibawah angka 1 (satu) persen kecuali tahun 2008 dan 2009 dimana pada tahun 2008 rasionya 179% dan tahun 2009 106%. Ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah didalam memungut PAD (dalam hal ini pajak daerah) sudah efisien yang ditandai dengan *trend* rasio yang kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 (seratus) persen dari tahun ketahun. Artinya, dengan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit, pemerintah daerah dapat menghasilkan output (hasil) yang optimal dan memberikan penggambaran kinerja pemerintah daerah yang baik.

3). Analisis Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja tidak langsung) secara optimal. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap Anggaran} = \frac{\text{Total Belanja Daerah}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Total belanja pembangunan} = \frac{\text{Rasio belanja pembangunan terhadap anggaran}}{\text{Total anggaran}} \times 100\%$$

1. Rasio Belanja Rutin Terhadap Anggaran

Tahun 2008

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Rutin} &= \frac{369.776.954.302}{801.762.231.640} \times 100\% \\ &= 46,12\% \end{aligned}$$

Tahun 2009

$$\begin{aligned} \text{Rasio belanja rutin} &= \frac{390.355.133.441}{805.824.858.731} \times 100\% \\ &= 48,44\% \end{aligned}$$

Tahun 2010

$$\begin{aligned} \text{Rasio belanja rutin} &= \frac{474.896.133.338}{878.612.514.372} \times 100\% \\ &= 54,05\% \end{aligned}$$

Tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{Rasio belanja rutin} &= \frac{505.870.649.139}{1.196.988.070.626} \times 100\% \\ &= 42,26\% \end{aligned}$$

Tahun 2012

$$\begin{aligned} \text{Rasio belanja rutin} &= \frac{563.600.636.765}{1.303.983.396.858} \times 100\% \\ &= 43,22\% \end{aligned}$$

2. Rasio Belanja Pembangunan Terhadap Anggaran

Perhitungan belanja pembanunan pada Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 adalah sebagai berikut :

Tahun 2008

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Pembangunan} &= \frac{431.985.277.338}{801.762.231.640} \times 100\% \\ &= 53,88\% \end{aligned}$$

Tahun 2009

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Pembangunan} &= \frac{415.469.725.290}{805.824.858.731} \times 100\% \\ &= 51,56\% \end{aligned}$$

Tahun 2010

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Pembangunan} &= \frac{403.716.381.034}{878.612.514.372} \times 100\% \\ &= 45,95\% \end{aligned}$$

Tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Pembangunan} &= \frac{691.117.421.487}{1.196.988.070.626} \times 100\% \\ &= 57,74\% \end{aligned}$$

Tahun 2012

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Pembangunan} &= \frac{740.382.760.093}{1.303.983.396.858} \times 100\% \\ &= 56,78\% \end{aligned}$$

Tabel IV. 6
Perhitungan Rasio Keserasian
Tahun Anggaran 2008 – 2012

No.	Tahun	Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD	Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD
1	2008	46,12%	53,88%
2	2009	48,44%	51,56%
3	2010	54,05%	45,95%
4	2011	42,26%	57,74%
5	2012	43,22%	56,78%

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2013

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh

dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Dari hasil perhitungan pada tabel IV.6 diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) masih diprioritaskan untuk pemenuhan belanja rutin, sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD masih relatif kecil. Seharusnya pemerintah daerah lebih memperhatikan sektor pembangunan yang mempunyai *multiplier effect* yang artinya proses yang menunjukkan sejauh mana pendapatan nasional akan berubah efek dari perubahan dalam pengeluaran agregat. *Multiplier* bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran *agregat* ke atas tingkat keseimbangan dan terutama keatas tingkat pendapatan nasional, dan pengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Hal ini dapat dilihat pada tahun anggaran 2008 presentase rasio belanja rutin terhadap APBD adalah sebesar 46,12% dan rasio pembangunan terhadap APBD adalah sebesar 53,88%. Ini diakibatkan oleh belanja modal yang mencapai Rp. 234.534.288.420,-

Pada tahun anggaran 2009 presentasi rasio belanja rutin terhadap APBD naik sebesar 2,32% dari tahun anggaran 2008 menjadi 48,44%. Sedangkan rasio pembangunan terhadap APBD menalami penurunan 2,32% menjadi 51,56% dari tahun 2008. hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sedang mengambil langkah dan tindakan yang serius dan berarti untuk memenuhi pembangunan daerahnya.

Pada tahun anggaran 2010 presentase rasio belanja rutin terhadap APBD mengalami kenaikan sebesar 5,61% dari tahun anggaran 2009 menjadi 54,05% dan presentase rasio pembangunan terhadap APBD mengalami penurunan 5,61% dari rasio belanja pembangunan pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2011 anggaran presentase rasio belanja rutin mengalami penurunan menjadi 11,79% dari rasio belanja rutin tahun sebelumnya, dan rasio belanja pembangunan mengalami kenaikan 11,79% dari rasio belanja pembangunan tahun sebelumnya menjadi 57,74%.

Pada tahun anggaran 2012 presentase rasio belanja rutin terhadap APBD mengalami kenaikan menjadi 43,22% dari rasio belanja rutin tahun 2011 dan rasio belanja pembangunan mengalami penurunan menjadi 56,78%.

Ini artinya APBD pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) masih didominasi oleh belanja kebutuhan aparat pemerintah daerah (belanja rutin). Pemerintah daerah belum sepenuhnya mengalihkan fokus aktifitas wilayah pemerintahnya agar mengarah kepada belanja pembangunan yang tentunya ini akan memberikan dampak kepada usaha peningkatan pendapatan daerah dari segi pembangunan daerah. Aktivitas wilayah merupakan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari pengembangan dan pembangunan wilayah dan merupakan suatu pengembangan yang terpadu dengan memanfaatkan saling keterkaitan antar sektor yang membentuk struktur ruang wilayah. Wilayah sebagai wadah kegiatan ekonomi memiliki peran penting bagi wilayahnya sendiri maupun daerah disekitar wilayah. Memahami sistem aktivitas wilayah, pola perilaku manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan wilayah, yaitu sistem

kegiatan yang menyangkut hubungan yang lebih kompleks dengan berbagai sistem kegiatan yang lain, baik dengan perorangan, kelompok dan lembaga.

4). Rasio Pertumbuhan

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan mengingatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Rumus Rasio Pertumbuhan adalah:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PADt1} - \text{PADt0}}{\text{PADt0}} \times 100\%$$

PADt1 = Penerimaan Tahun lalu

PADt0 = Penerimaan Tahun Sekarang

Perhitungan rasio pertumbuhan pada Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) adalah sebagai berikut:

Tahun 2008/2009

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan} &= \frac{33.444.471.314,31 - 27.325.153.255,29}{27.325.153.255,29} \times 100\% \\ &= 22,39\% \end{aligned}$$

Tahun 2009/2010

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan} &= \frac{34.035.650.199,25 - 33.444.471.314,31}{33.444.471.314,31} \times 100\% \\ &= 17,68\% \end{aligned}$$

Tahun 2010/2011

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan} &= \frac{47.387.305.538,43 - 34.035.650.199,25}{34.035.650.199,25} \times 100\% \\ &= 39,22\% \end{aligned}$$

Tahun 2011/2012

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan} &= \frac{54.692.346.473,49 - 47.387.305.538,43}{47.387.305.538,43} \times 100\% \\ &= 15,41\% \end{aligned}$$

Tabel IV. 7
Rasio Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun Anggaran 2008 – 2012

Tahun	PADto	PADt1	Rasio Pertumbuhan
2008/2009	27.325.153.355,29	33.444.471.314,31	22,39%
2009/2010	33.444.471.314,31	34.035.650.199,25	17,68%
2010/2011	34.035.650.199,25	47.387.305.538,43	39,22%
2011/2012	47.387.305.538,43	54.692.346.473,49	15,41%

Pada tabel IV.7 di atas, rasio pertumbuhan pada tahun 2008/2009 sebesar 22,39% turun menjadi 17,68% tahun 2009/2010, kemudian naik menjadi 39,22% pada tahun 2010/2011 dan pada tahun 2011/2012 turun lagi dari 39,22% menjadi 15,41%.

Berdasarkan hasil perhitungan, pertumbuhan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) belum begitu baik karena selama kurun waktu 5 tahun ini yang terlihat pada tabel IV.7 rasio pertumbuhan belum stabil karena mengalami turun naik dari tahun ketahun. Pertumbuhan suatu daerah dapat dikatakan baik karena pemerintah daerah dapat mengefisienkan biaya yang dikeluarkan untuk belanja rutin dan lebih mengefektifkan penggunaan

pendapatan yang diperoleh daerah untuk sektor pembangunan yang dapat mendukung peningkatan penerimaan PAD.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) optimis untuk terus menaikkan pertumbuhan ekonomi, terutama diharapkan dari sumbangan beberapa sektor dominan seperti perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan serta perdagangan dan jasa, yang dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang sangat kuat untuk menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif dan terbuka, sehingga menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai rasio keuangan pada APBD pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat belum cukup memadai dimana tahun 2008 sebesar 386% dan tahun 2009 kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi 450%, ini berarti menggambarkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bisa dinilai belum cukup mandiri. Karena meskipun dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan akan tetapi bantuan dari Pemerintah Pusat lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)
2. Efektivitas pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2008 sebesar 102%, tahun 2009 sebesar 103%, tahun 2010 sebesar 105%, tahun 2011 sebesar 122% dan tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 96%, ini berarti bahwa tahun 2008 sampai 2012 kemampuan daerah menjalankan tugasnya sangat efektif. Efisiensi pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada tahun 2008 sebesar 1,9% tahun 2009 sebesar 106% tahun 2010 sebesar 95%, tahun 2011 sebesar 31% dan tahun

2012 sebesar 28%. Pasal 76 peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah dan restribusi, dimana biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) ini berarti menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2008 sampai tahun 2012 efisien. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang cukup baik.

3. Aktivitas pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) masih di prioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin/aparatur daerah sehingga belanja pembangunan / pelayanan publik terhadap APBD masih terlalu kecil.
4. Kontribusi sumber-sumber pendapatan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada tahun 2008 sampai 2012 kontribusi PAD pada tahun 2008 berkisar 22,39%, tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 17,68%, kemudian pada tahun 2010 naik menjadi 39,22%, dan tahun 2012 mengalami penuruna menjadi 15,41%. Ini berarti penerimaan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) masih terpusat pada dana perimbangan, belum dapat untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah seperti pajak dan restribusi daerah.
5. Pertumbuhan APBD Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang cukup baik dan menunjukkan yang positif, pertumbuhan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2010/2011 dimana pertumbuhan PAD sebesar 39,22%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut ini akan diberikan saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dalam mengelola keuangan daerahnya dimasa yang akan datang. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Agar pungutan Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi sumber penerimaan yang ideal dan bersifat kontinu, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) harus selalu berusaha menggali sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan membuat peraturan daerah bagi beberapa sektor pajak yang dianggap potensial. Pemerintah daerah harus dapat memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pembangunan secara optimal.
2. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) harus lebih transparansi dalam menyusun anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. **Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah**, Penerbit Salemba Empat
- Aviva Virgasari. 2009. **Hubungan Antara Opini Audit pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Dengan Kinerja Keuangan, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang**, (Tidak Dipublikasikan).
- Agnes Sawir. 2003. **Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan**
- Indrianto dan Supomo. 2004. **Metode Penelitian**. Cetakan Kedua, BPFE, Yogyakarta.
- Jusmawati. 2011. **Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Terhadap Efisiensi Pedapatan Asli Daerah, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin Makasar**, (Tidak Dipublikasikan).
- Jumingan. 2005. **Analisis Laporan Keuangan**, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kuswandi. 2006. **Memahami Rasio-Rasio Keuangan Bagi Orang Awam**. PT. Tlox Media Komputindo Gramedia, Jakarta.
- LKPJ. 2010. **Pelaporan Keuangan Pertanggungjawaban**. Penerbit SPM Mengikuti Peraturan.
- Lutfian Hidayatul Husna. 2011. **Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2005-2009 (Studi Pda Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar)**, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Tidak Dipublikasikan).
- M. Iqbal Hasan. 2003. **Materi Statistik**. Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mulyadi dan Jhoni Setiawan. 2001. **Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen**, edisi kedua, cetakan pertama, salemba empat. Jakarta.
- Mulyadi. 2001. **Sistem Akuntansi**. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2002. **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi, dkk. 2007. **Akuntansi Pemerintah**. Jakarta. Salemba Empat.

Nan Lin, Alin Bahasa W. Gulo. 2002. **Metode Penelitian**, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Sofyan Syafri Harahap. 2008. **Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono. 2011. **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kesembilan CV. Alfabeta, Bandung.

Suherman. 2009. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Jakarta. Penerbit IPW

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Tabel I.2
Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Ogan Komering Ilir
(OKI)
Tahun 2008 — 2012

No	Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pendapatan Daerah					
	PAD	27.325.153.355,29	33.444.471.314,31	34.035.650.199,25	47.387.305.538,43	54.629346.473,49
	1. Pajak Daerah	4.552.965.635	5.097.861.940	7.271.596.519	13.209.683.829	13.590.399.104
	2. Retribusi Daerah	9.634.948.0871	12.158.805443	11.944.952.665	12.626.667.520	20.493.190.199
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.866.200425,29	4.059.758.279,11	4.669.237.317,47	6.368.539.955,94	6.982.629.184,78
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	10.271.039.208,29	12.128.045.652,20	10.149.863.697,78	15.182.414.233,49	13.626.127.985,71
	Dana Perimbangan	707.549.066460	742.383.605.221	832.965.818.526	977.191.646.403	1.050.762.693.363
	1. Bagi hasil pajak dan Bagi hasil bukan pajak	136.411.640460	135.534.206.221	187.251.544.126	141.039.597.403	224.588.522.363
	2. Dana Alokasi Umum	510.395.426.000	533.734.399.000	541.732.260.000	669.904.298.000	743.452.601.000.
	3. Dana Alokasi Khusus	60.742.000.000	73.115.000.000	67.107400.000	66.414.400.000	82.721.570.000
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	36.077.053.787	39.774.137.231	37.474.893.685	172.235.813449,91	168.511.640.448,82
	Total Pendapatan Daerah	770.591.273.602,29	815.602.213.766,31	904.476.362.410,25	1.196.814.765.391,34	1.273.966.680.285,31

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), 2012

Tabel I.2
Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Ogan Komering Ilir
(OKI)
Tahun 2008 - 2012

No	Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012
2	Belanja Daerah					
-	Belanja Tidak Langsung	368.776.954.302	390.355.133.441	474.896.133.339	505.870.649.139	563.600.636.765
	1) Belanja Pegawai	268.872.115.387	314.242.763.626	395.033.425.145	442.073.212.359	500.747.853.835
	2) Subsidi	1.040.000.000	2.245.850.000	720.000.000.000	720.000.000	720.000.000
	3) Hibah	31.316.617.345	14.451.747.150	19.002.420.000	22.807.602.000	16.228.401.500
	4) Bantuan Sosial	22.381.416.171	11.788.558.277	13.791.527.013	12.420.544.276	18.654.668.456
	5) Belanja Bagi hasil	34.456.621.399	34.051.710.388	32.468.579.054	14.808.590.004	14.261.593.174
	6) Bantuan keuangan	11.627.684.000	13.404.004.000	13.880.182.126	13.040.700.000	12.778.400.000
	7) Belanja tidak terduga	82.500.000	170.500.000	000	000	209.719.800
-	Belanja Langsung	431.985.277.338	415.496.725.290	403.716.381.034	691.117.421.487	740.382.760.093
	1) Belanja Pegawai	37.433.243.575	39.948.259.590	34.506.388.176	25.268.634.380	25.407.666.215
	2) Belanja Barang dan Jasa	160.017.745.343	182.780.715.670	176.926.260.922	298.923.502.435	333.681.088.681
	3) Modal	234.534.288.420	192.740.750.030	192.283.731.936	366.925.284.672	381.294.005.197
	Total Belanja	801.762.231.640	805.824.858.731	878.612.514.372	1.196.988.070.626	1.303.983.399.858
	Total Selisih	(31.170.958.038,29)	19.777.355.035,31	25.863.848.038,25	(173.305.235,34)	(30.016.716.573,31)

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), 2012

Tabel IV.1
Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 2008 s/d 2012

No	Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pendapatan Asli Daerah	27.325.153.355,29	33.444.471.314,31	34.035.650.199,25	47.387.305.538,43	54.629.346.473,49
	Dana Perimbangan	707.549.066.460	742.383.605.221	832.965.818.526	977.191.646.403	1.050.762.693.363
	Lain-lain					
	Pendapatan sah yang lain	36.077.053.787	39.774.137.231	37.474.893.685	172.235.813.449,91	168.511.640.448,82
	Total Pendapatan Daerah	770.591.273.602,29	815.602.213.766,31	904.476.362.410,25	1.196.814.765.391,34	1.273.966.680.285,31
2	Belanja Daerah					
	• Belanja Tidak Langsung	369.776.954.302	390.355.133.441	474.896.133.339	505.870.649.130	563.600.636.765
	• Belanja Langsung	431.985.277.338	415.469.725.290	403.716.381.034	691.117.421.487	740.382.760.093
	Total Belanja	801.726.231.640	805.824.858.731	878.612.514.372	1.196.988.070.626	1.303.983.396.858

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 2012

Tabel IV. 2
 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
 Bagi hasil Pajak dan Bantuan dari Pemerintah Pusat
 Tahun 2008 s / d 2012

No	Jenis Penerimaan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pajak Daerah	4.552.965.635,-	5.097.861.940	7.271.596.519	13.209.683.829	13.590.346.473,49
2	Retribusi Daerah	9.634.948.087	12.158.805.443	11.944.952.665	12.626.667.520	20.493.190.199
3	Laba BUMD	2.866.200.425,29	4.059.758.279,11	4.669.237.317,47	6.368.539.955,94	6.982.629.184,78
4	Lain PAD yang sah	10.271.039.208	12.128.045.652	10.149.863.697,78	15.182.414.233,49	13.626.127.985,71
	Total PAD	27.325.153.355,29	33.444.471.314,31	34.035.650.199,25	47.387.305.538,43	54.692.346.473,49
	Bagi hasil & bantuan propinsi	707.549.066.460	742.383.605.221	187.251.544.126	977.191.646.403	1.050.762.693.363

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 2012



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Jln. Lintas Timur No. 1 Muara Baru
KAYU AGUNG

Kayu Agung, Juli 2013

Nomor : 900/08/VI/2013
Sifat : Biasa
Lampiran :
Prihal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang
Di
Tempat

Sehubungan dengan surat saudara nomor : 330/G-17/FE-UMP/XI/2013 tanggal 15 Februari 2013 perihal permohonan bantuan data, berkenaan dengan hal tersebut dapat kami terangkan sebagai berikut :

Nama : LIJIS ATMAWATI
NIM : 22 2009 016
Jurusan : Akuntansi

Benar telah memperoleh data/keterangan tentang APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir dari Tahun Anggaran 2008 hingga Tahun Anggaran 2012 yang dipergunakan untuk menyelesaikan skripsi dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

Demikianlah surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya dan penuh rasa tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir

H. Muslim.SE.M.Si
NIP. 19640730 199203 1 004

SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI TES TOEFL

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya ujian komprehensif di Fakultas Ekonomi UMP, maka mahasiswa dengan nama di bawah ini telah mengikuti tes TOEFL, untuk diperbolehkan sementara mendaftar pada ujian tersebut, yaitu :

NO	NAME	STUDENT NUMBER
1	LILIS ASTAWIATI	22.2009.016

• Palembang, 22 Maret 2013



M. Taufiq Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si

NB : (Surat keterangan ini dilaporkan asli, tidak boleh difotokopi)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

A MAHASISWA : LILIS ATMAWATI	PEMBIMBING
: 22 2009 016	KETUA : Drs. Sunardi, S.E, M.Si
JURUSAN : AKUNTANSI	ANGGOTA : Welly, S.E, M.Si
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OKAN KOMERING ILIR (OKI)	

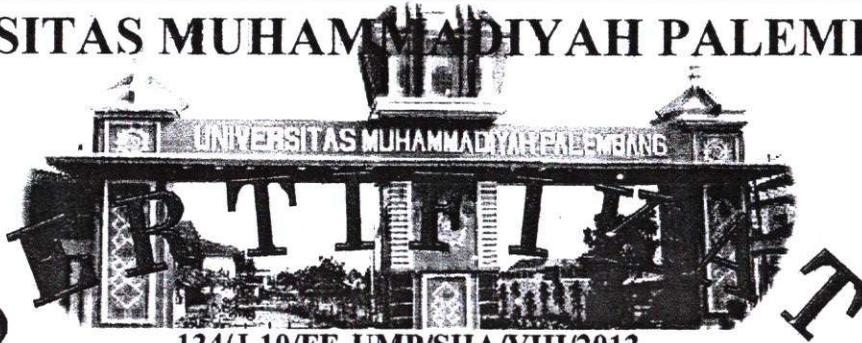
TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
17/6 - 2013	Bab I - III		<i>[Signature]</i>	Perbaiki
27/6 - 2013	Bab I - III		<i>[Signature]</i>	Perbaiki
3/7 - 2013	Bab I - III		<i>[Signature]</i>	acc
12/7 - 2013	Bab IV		<i>[Signature]</i>	Perbaiki
18/7 - 2013	Bab IV		<i>[Signature]</i>	Perbaiki
20/7 - 2013	Bab IV		<i>[Signature]</i>	Perbaiki
02/8 - 2013	Bab IV		<i>[Signature]</i>	acc
02/8 - 2013	Bab V		<i>[Signature]</i>	acc
15/8 - 2013	Bab I - sd V		<i>[Signature]</i>	Acc

CATATAN :
 Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang
 Pada tanggal : / /
 a.n. Dekan
 Ketua Jurusan
[Signature]
ROSALINA GHAZALI, S.E., Ak., M.Si

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

S



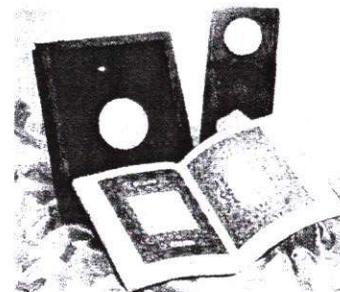
134/J-10/FE-UMP/SHA/VIII/2013

T

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : LILIS ATMAWATI
NIM : 222009016
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 02 Agustus 2013

an. Dekan
Wakil Dekan IV




Drs. Antoni, M.H.I.

SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI TES TOEFL

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya ujian komprehensif di Fakultas Ekonomi UMP, maka mahasiswa dengan nama di bawah ini telah mengikuti tes TOEFL, untuk diperbolehkan sementara mendaftar pada ujian tersebut, yaitu :

NO	NAME	STUDENT NUMBER
1	LILIS ASMAWIATI	22.2009016

Palembang, 22 Maret 2013



M. Taufiq Syamsuddin, SE., Ak., M.Si

NB : (Surat keterangan ini dilaporkan asli, tidak boleh difotokopi)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)
 JURUSAN AKUNTANSI (S1)
 MANAJEMEN PEMASARAN (D-III)

IZIN PENYELENGGARAAN

: No. 3619/D/T/K-II/2010
 : No. 3620/D/T/K-II/2010
 : No. 7094/D/T/K-II/2011

AKREDITASI

No. 018/BAN-PT/AK-XI/S1/III/2008 (B)
 No. 044/BAN-PT/AK-XIII/S1/II/2011 (B)
 No. 005/BAN-PT/AK-X/Dpi-III/VI/2010 (B)

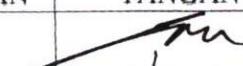
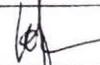
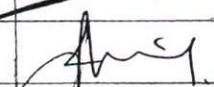
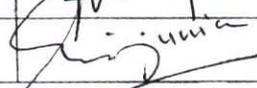
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2013
 Waktu : 13.00 – 16.00
 Nama : Lilis Atmawati
 Nim : 22 2009 016
 Jurusan : Akuntansi
 Bidang Skripsi : Akuntansi Sektor Publik
 Judul : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Drs. Sunardi, SE.,M.Si	Pembimbing I	12/10/2013	
2	Welly, SE,M.Si	Pembimbing II	12/10/2013	
3	Drs. Sunardi, SE.,M.Si	Ketua Penguji	12/10/2013	
4	Aprianto, SE,M.Si	Anggota Penguji	12/10/2013	
5	Lis Djuniar, SE,M.Si	Anggota Penguji	10-9-2013	

Palembang, Agustus 2013-09-03

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi


Rosalina Ghazali, SE.,AK.,M.Si
 NIDN/NBM: 0228115802/1021961




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)
JURUSAN AKUNTANSI (S1)
MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)

IZIN PENYELENGGARAAN

: No. 3619/D/T/K-II/2010
: No. 3620/D/T/K-II/2010
: No. 7094/D/T/K-II/2011

AKREDITASI

No. 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/III/2008 (B)
No. 044/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
No. 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2013
Waktu : 13.00 – 16.00
Nama : Lilis Atmawati
Nim : 22 2009 016
Jurusan : Akuntansi
Bidang Skripsi : Akuntansi Sektor Publik
Judul : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Drs. Sunardi, SE.,M.Si	Pembimbing I	12/10/2013	
2	Welly, SE,M.Si	Pembimbing II	12/10/2013	
3	Drs. Sunardi, SE.,M.Si	Ketua Penguji	12/10/2013	
4	Aprianto, SE,M.Si	Anggota Penguji	12/10/2013	
5	Lis Djuniar, SE,M.Si	Anggota Penguji	10-9-2013	

Palembang, Agustus 2013-09-03

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi



Kuslinda Chalid, SE,AK.,M.Si

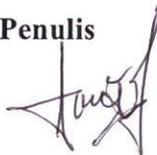
NIDN/NBM : 0228115802/1021961

BIODATA PENULIS

Nama : Lilis Atmawati
Nim : 22 2009 016
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Tempat Tanggal Lahir : Rimbo Bujang, 15 Agustus 1991
Alamat : Desa Lempuing Indah Rt.02 Kecamatan Lempuing
Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)
Taman SD : SDN Lempuing Indah
Taman SLTP : MTS Miftahul Huda
Taman SMA : MA Miftahul Huda
Taman Kuliah : Universitas Muhammadiyah Palembang
No HP : 081222641145
Nama Orang Tua
Ayah : Judin
Ibu : Poniem
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Desa Lempuing Indah Rt 02 Kecamatan Lempuing
Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

Palembang, Agustus 2013

Penulis



Lilia Atmawati